

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi telah membawa dampak besar dalam tata kelola pemerintahan. Proses globalisasi dalam pemerintah meminta untuk lebih terbuka, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya, termasuk anggaran negara dan daerah. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, serta meningkatnya interaksi antara negara-negara di dunia mendorong peningkatan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Globalisasi juga menuntut efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran publik, terhadap kinerja aparatur pemerintah, termasuk di tingkat kecamatan.

Kecamatan sebagai salah satu unit pemerintahan di tingkat lokal memiliki kewenangan yang sangat strategis, meskipun terbatas jika dibandingkan dengan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Kewenangan kecamatan mencakup penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Kecamatan juga diberi tanggung jawab untuk mengelola anggaran yang bersumber dari pemerintah kabupaten atau kota, yang digunakan untuk berbagai program dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan kewenangan tersebut, pengelolaan anggaran dan pengawasan yang baik sangat penting agar anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Didalam PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan yaitu pada pasal 15 ayat (2) disebutkan rambu – rambu kewenangan yang perlu didelegasikan oleh Bupati atau Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang salah satunya yaitu aspek pengawasan. Pelaksanaan kewenangan tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai dengan perundang – undangan. Untuk itu, pelaksanaan pengawasan terhadap pegawai perlu dilakukan dan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan, karena ruang lingkup pengawasan meliputi keseluruhan pelaksanaan kegiatan

Kecamatan merupakan bagian dari kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas beberapa kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. (Fajar Tri Sakti, 2020, p. 136). Kantor Kecamatan Rancaekek, yang terletak di Kabupaten Bandung, memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayahnya. Kecamatan Rancaekek melaksanakan berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan administrasi publik. Dalam konteks ini, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi sangat krusial agar berbagai program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menilai bagaimana pengawasan anggaran di kecamatan dapat mempengaruhi efektivitas kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Efektivitas kinerja pegawai adalah ukuran sejauh mana seorang pegawai dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau instansi pemerintah. Dalam konteks kantor kecamatan, efektivitas kinerja dapat dilihat dari kemampuan pegawai dalam menjalankan program-program pembangunan, memberikan pelayanan publik yang cepat dan akurat, serta mengelola sumber daya, termasuk anggaran, dengan baik. Menurut Robbins & Judge (2017), efektivitas kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kompetensi pegawai, motivasi, dan sistem pengawasan yang ada. Sebuah sistem pengawasan anggaran yang baik dapat meningkatkan kesadaran pegawai untuk bekerja lebih optimal dan menghindari penyalahgunaan anggaran, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kinerja mereka.

Pengawasan anggaran adalah salah satu elemen penting dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan dengan cara yang tepat dan efisien. Menurut Mardiasmo (2018), pengawasan anggaran melibatkan kegiatan pengendalian dan evaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa sumber

daya digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Pengawasan yang baik dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dalam perimbangan keuangannya. Perimbangan keuangan diartikan sebagai suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (Fajar Tri Sakti, 2020, p. 126)

Kinerja yang optimal bergantung kepada perilaku yang tercermin oleh para pegawai itu sendiri. Perilaku tersebut meliputi sikap dan disiplin pegawai pada pelaksanaan tugas yang dikerjakan. Penilaian kinerja pegawai yang dilakukan oleh pimpinan secara sistematis berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang baik maka diharapkan kinerja pegawai terutama di bidang kontrol pengawasan dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif dan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Mardiasmo (2002) - Dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik", Mardiasmo menekankan bahwa pengawasan anggaran merupakan bagian dari pengelolaan keuangan yang berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan dana publik dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Pengawasan yang ketat diperlukan agar anggaran tidak disalahgunakan, dan tercapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Pentingnya pengawasan anggaran di kecamatan untuk mencegah penyimpangan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Sebagai unit pemerintahan yang berada di garis depan, kecamatan memerlukan pengawasan yang baik agar anggaran yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan dari hasil dari pengamatan dan penelitian awal yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Rancaekek, peneliti menemukan masalah pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun anggaran 2021-2022 menunjukkan bahwa pagu anggaran belum sepenuhnya terealisasikan dan capaian mengenai program Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2021-2022 dari setiap tahunnya belum tercapai sepenuhnya, berikut laporan anggaran yang disajikan.

**Tabel 1. 1**

**Laporan Realisasi Anggaran 2021- 2022**

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
2021	8.515.450.538,92	7.216.452543	84,74
2022	9.207.433.000	8.272.044.844	89,84

*Sumber : LAKIP 2021-2022*

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Rancaekek Tahun 2021 dan 2022 Pagu Anggaran pada tahun 2021 Pagu Anggaran yang direncanakan adalah Rp. 8.515.450.538,92 dengan realisasi Rp. 7.216.452543 dengan selisih diantara keduanya sebesar Rp. 1,298,997,995 berikutnya pada tahun 2022 Pagu Anggaran yang direncanakan adalah Rp. 9.207.433.000 dengan realisasi Rp.8.272.044.844 dengan selisih diantara keduanya sebesar Rp. 935,388,156.

**Tabel 1. 2**

**Laporan Program Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja  
perangkat daerah 2021-2022**

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
2021	25.000.000	14.305.000	57,22%
2022	56.000.000	48.213.990	86,10%

*Sumber : LAKIP 2021-2022*

Berdasarkan laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Rancaekek Tahun 2021 dan 2022 Pagu Anggaran pada tahun 2021 Pagu Anggaran yang direncanakan adalah Rp. 25.000.000 dengan realisasi Rp. 14.305.000 dengan selisih diantara keduanya sebesar Rp. 10.695.000 atau 57,22% berikutnya pada tahun 2022 Pagu Anggaran yang direncanakan adalah Rp. 56.000.000 dengan realisasi Rp. 48.213.990 dengan selisih diantara keduanya sebesar Rp7.786.010 atau 86,10%.

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas kinerja pada kantor kecamatan rancaekek masih belum optimal, hal ini diduga belum tercapainya aspek aspek yang dinilai berkaitan dengan efektivitas kinerja menurut Daff 2010, mengenai indicator keterampilan kinerja. adanya hambatan dalam menjalankan pekerjaan sehingga kinerjanya menjadi kurang efektif, mengenai mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang masih kurang baik hal ini terjadi karena pemasalahan pembuatan KTP yang cenderung lebih lama setelah di berlakukanya E-KTP.

Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat bahwa pagu anggaran dan program mengenai Laporan Program Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2021-2022 belum mencapai pencapaian 100% dalam realisasi anggaran terdapat beberapa program atau kegiatan yang belum dilaksanakan dengan optimal yang membuat realisasi penggunaan anggaran pada beberapa komponen menjadi tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Adanya penurunan

tingkat penyerapan pelaksanaan anggaran tersebut membuktikan adanya permasalahan yang menghambat proses pelaksanaannya. Mengingat penggunaan anggaran menjadi hal penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Anggaran yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang berarti terjadi dana yang tidak di gunakan karena kegiatan yang telah direncanakan tidak berjalan. Hal tersebut dapat berdampak kepada jalannya pelaksanaan kinerja pada organisasi sektor publik yang dalam hal ini menjadi kurang optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya tindak lanjut dalam mengevaluasi efektivitas kinerja pegawai pada kantor kecamatan rancaekek.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk menyelidiki sejauh mana pengaruh pengawasan anggaran terhadap efektivitas kinerja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH PENGAWASAN ANGGARAN TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN RANCAEKEK.**

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Terdapat pagu anggaran yang sudah ditetapkan namun tidak terealisasi sepenuhnya 100% dari tahun 2020-2021 mengalami naik-turunnya realisasi anggaran , pada tahun 2022 Realisasi Anggaran Mencapai 89,84 %.
2. Program perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada tahun 2022 yaitu mencapai 86,10% yang tidak sepenuhnya terlaksana dengan pagu anggaran yang di tetapkan yaitu 100% namun program yang di realisasikan tidak mencapai presentase yang di targetkan.
3. Kurangnya optimalisasinya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realiasasi SKPD (satuan kerja perangkat daerah)

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Bagaimana kondisi pengawasan anggaran terhadap efktivitas kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Rancaekek?

2. Apakah terdapat pengaruh pengawasan anggaran terhadap efektivitas kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Rancaekek?
3. Seberapa besar pengaruh pengawasan anggaran terhadap efektivitas kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Rancaekek?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang sudah di paparkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi pengawasan anggaran terhadap efektivitas kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Rancaekek.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan anggaran terhadap efektivitas kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Rancaekek.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh pengawasan anggaran terhadap efektivitas kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Rancaekek.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca, adapun manfaat lainnya sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Pada penelitian ini diharapkan menjadi referensi kajian Ilmu Administrasi khususnya yaitu pada sektor keuangan publik, yang berkaitan dengan pelaksanaan terhadap fungsi Pengawasan Anggaran.

##### **b. Manfaat Praktisi**

- a) Bagi Instansi: Untuk meningkatkan kinerja instansi ke depannya, instansi terkait yaitu Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dalam Pengawasan Anggaran Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Agar Dapat Meningkatkan kualitas di masa yang akan mendatang.
- b) Untuk Almamater: Untuk menambah bahan literatur atau bahan bacaan lain yang mungkin dapat membantu orang-orang yang terlibat mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang subjek yang sama.
- c) Bagi Peneliti: Melengkapi Syarat kelulusan program studi

Administrasi Publik dengan menambah pengetahuan teoritis dan praktis tentang efektivitas kinerja pegawai dan Pengawasan Anggaran.

- d) Untuk Peneliti Selanjutnya : Berkontribusi pada Literatur dan Menjadi Model serta Referensi Penelitian yang Lebih Lanjut, Khususnya penelitian yang sama atau topik yang sama.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pembahasan skripsi ini terkait Pengaruh Pengawasan anggaran terhadap efektivitas kinerja pegawai pada kantor kecamatan rancaekek yang dimana untuk melakukan penelitian, diperlukan dasar teori yang terkait dengan bahasan yang hendak diamati untuk membicarakan dan memecahkan masalah yang terkait.

Pengawasan Anggaran menurut (Handoko, Manajemen, 2017) yaitu menggunakan target yang telah ditentukan dalam anggaran untuk memantau tindakan manajerial dengan membandingkan implementasi nyata dan implementasi yang diharapkan. Menurut Handoko ada lima indikator dari pengawasan anggaran yaitu :

### 1. Penetapan standar

pelaksanaan Pada tahap awal pengawasan pertama yaitu penerapan standar sebagai satuan pengukuran yang dijadikan pedoman atau patokan penilaian hasil. Standar ini dapat dilihat dari tujuan, sasaran, kuota dan target penilaian.

### 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan

Pengukuran pelaksanaan yaitu menentukan bagaimana pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan terkait pelaksanaan kegiatan.

### 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Mengikuti penentuan frekuensi pengukuran dan sistem pemantauan, maka proses implementasi pengukuran bersifat iteratif dan berkesinambungan. Pekerjaan dapat dievaluasi dalam berbagai cara, termasuk melalui pengamatan, laporan lisan dan tertulis, inspeksi, atau pengambilan sampel.

#### 4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Dimensi ini menjelaskan bagaimana pengawasan dilakukan apakah pelaksanaan pengawasan sesuai dengan standar yang diinginkan.

#### 5. Pengambilan Tindakan koreksi

Apabila ditemukan penyimpangan atau masalah dalam pelaksanaan pekerjaan dan perlu segera diperbaiki, dilakukan tindakan perbaikan atau perbaikan. Dipercayai bahwa tindakan perbaikan yang diambil sebagai tanggapan atas penyimpangan akan memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Menurut Daft (2010), efektivitas kinerja berkaitan dengan kemampuan organisasi atau individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang optimal. Dalam konteks ini, efektivitas mengacu pada pencapaian hasil yang diinginkan, sementara efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil tersebut

Adapun aspek-aspek yang dinilai berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam sebuah organisasi atau perusahaan menurut Daft (2010) adalah meliputi sebagai berikut:

##### 1. Keterampilan kerja

Keterampilan menunjukkan kemampuan dan keahlian karyawan yang mendukung pelaksanaan tugas. Keterampilan merupakan bekal karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Keterampilan karyawan mencakup kemampuan, pengetahuan, kecakapan interpersonal, dan kecakapan teknis. Keterampilan dapat dipelajari secara formal atau dengan cara belajar sendiri tergantung dengan kebutuhan. Seorang karyawan yang memiliki keterampilan rendah akan mengalami banyak hambatan dalam menjalankan pekerjaannya sehingga kinerjanya menjadi kurang efektif. Sebaliknya, karyawan yang memiliki keterampilan tinggi akan mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik sehingga kinerjanya dapat dinilai efektif.

##### 2. Peningkatan prestasi kerja

Prestasi kerja merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk

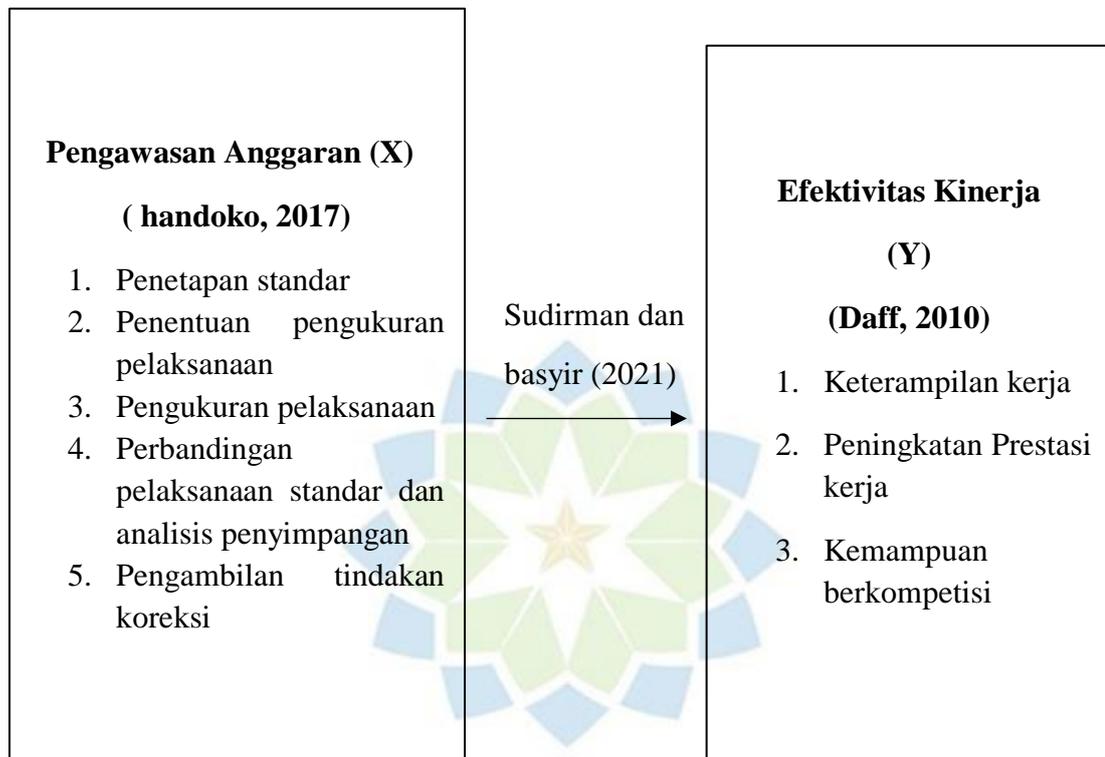
menilai kinerja seseorang ataupun organisasi. Prestasi kerja individu menyangkut kemampuan ataupun keberhasilan seseorang menjalankan pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan melebihi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

### 3. Kemampuan berkompetisi

Dalam dunia kerja, kompetisi merupakan salah satu hal yang penting. Kompetisi yang dimaksud dilakukan secara positif misalnya bekerja lebih baik dari orang lain. Kompetisi semacam ini sifatnya positif dan tidak merugikan pihak lain. Setiap orang diharapkan mampu berkompetisi secara sehat karena akan dapat memotivasi setiap karyawan untuk memberikan hasil yang terbaik.

Sudirman & Basyir (2021) dalam bukunya yang berjudul *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Anggaran*, Sudirman dan Basyir, mengungkapkan bahwa pengawasan anggaran yang efektif dapat memperbaiki efektivitas kinerja pegawai melalui pengendalian anggaran yang ketat dan evaluasi berkala. Mereka menekankan pentingnya pengawasan yang melibatkan audit internal dan eksternal untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan kebijakan, yang berpengaruh pada efektivitas kinerja pegawai.

**Gambar 1. 1 Kerangka Pikir**



### **G. Hipotesis**

Ho : Pengawasan anggaran tidak berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai di kantor kecamatan rancaekek.

H1 : pengawasan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai di kantor kecamatan rancaekek.